

## **BAB IV**

### **PEMILUKADA DAN PERILAKU POLITIK ELITE DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

Temanggung adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Jawa Tengah dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi serta potensi daerah yang bagus, seperti hasil bumi yang berlimpah berupa tembakau, kopi serta palawija. Daerah yang subur dengan kekuatan potensi yang kaya hasil bumi, tentu memiliki pendapatan daerah yang kaya pula. Wajar, jika banyak partai politik melalui ranah Pemilukada melirik potensi itu dengan berlomba-lomba ingin memimpin daerah tersebut. Pandangan mereka, bahwa dengan potensi daerah yang kaya, tentu banyak hal yang dapat diperbuat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan warga.

Pemilukada merupakan pintu masuk partai sebagai arena pertarungan politik daerah di dalam mempresentasikan para kandidatnya. Hal yang menarik yang dapat diamati dari pertarungan tersebut, adalah perilaku politik elite dalam hal ini elite Muhammadiyah. Perilaku politik elite Muhammadiyah pada Pemilukada kabupaten Temanggung tahun 2013 menjadi sorotan penting guna mengungkap bagaimana perilaku politik mereka di arena pertarungan politik tersebut.

#### **4.1 Geografi Kabupaten Temanggung**

Menurut data Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo), bahwa kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. kabupaten Temanggung secara astronomis terletak di antara 110o23'-

110o46'30" bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km<sup>2</sup> (87.065 Ha). Batas-batas administratif Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km) (Data Dinkominfo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, tahun 2017).

Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau antara Bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara Bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, udara pegunungan berkisar antara 20 C-30 C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (Lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroti.<sup>1</sup>

Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, dibagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut kearah Tenggara. Dengan topografi

---

<sup>1</sup><http://web.temanggungkab.go.id/home/halaman/7/sekilas-temanggung>.

semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah/kawasan. Sebagian wilayah kabupaten berada pada ketinggian 500 m 1450 m (24,3 %), luasan areal ini merupakan daerah lereng gunung Sindoro dan Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah (*Ibid*).

Secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-70% (landai sampai dengan sangat curam). Kabupaten Temanggung memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yaitu stadium erupisnya mulai muda sampai tua. Demografi Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 (716.295 orang), 2009 (722.087 orang) dan 2010 (721.679 orang), 2011 (727.184 orang), 2012 (733.418 orang yang terdiri dari 367.807 laki-laki dan 365.611 perempuan dengan kepadatan 842 orang per km<sup>2</sup>). Jarak dari Kota Temanggung Ke Ibu Kota Kecamatan (*Ibid*): Berikut data tentang wilayah yang berjarak dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam kilometer di kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Tabel 4.12  
Wilayah Kabupaten Temanggung dan Sekitarnya

No	Nama Wilayah	KM
1	Temanggung	0 km
2	Kranggan	4 km
3	Tlogomulyo	5 km
4	Bulu	6 km
5	Kedu	6 km
6	Kandangan	8 km
7	Tembarak	8 km
8	Parakan	12 km

9	Selopampang	14 km
10	Kaloran	15 km
11	Pringsurat	16 km
12	Bansari	18 km
13	Ngadirejo	19 km
14	Jumo	21 km
15	Kledung	22 km
16	Gemawang	23 km
17	Candiroto	28 km
18	Wonobojo	33 km
19	Bejen	34 km
20	Tretep	40 km

## 4.2 Dinamika Muhammadiyah di Temanggung

Temanggung merupakan daerah yang sejuk dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari beberapa organisasi sosial keagamaan yang tumbuh dan berkembang baik, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan yang telah lama berdiri dan berkembang pesat di Temanggung. Guna mengetahui bagaimana perjalanan dan perkembangan Muhammadiyah di Temanggung, penting memahami Dinamika Muhammadiyah di Temanggung.

Hampir memiliki kemiripan dengan daerah lain di tanah Jawa, menurut beberapa tokoh Muhammadiyah, Temanggung penuh dengan praktik-praktik agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut ditandai dengan marak praktik tahayul, bid'ah, khurafat serta kejawen. Masuknya Islam di Temanggung konsisi masyarakatnya sangat kental dengan praktik budaya peninggalan agama Hindu yang telah mendarah daging. Percampuran antara

Islam dan tradisi sinkretis, menjadikan wajah Islam tidak jelas secara aqidah. Hal ini disebabkan faktor budaya pedalaman yang bercorak agraris yang menetap statis yang menyebar keseluruh wilayah. Kondisi tersebut, memotivasi seseorang bernama Haji Ikhsan (kepala Agama Temanggung) untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai wadah guna mengadakan pembaharuan untuk meluruskan tauhid (Data diolah dari Data PDM Temanggung: 2018).

Gerakan pembaharuan Muhammadiyah di Temanggung yang dipelopori Haji Ikhsan, mendapat sambutan hangat masyarakat sekitar. Selanjutnya, dalam perjalanannya, dua tahun kemudian posisi haji Ikhsan sebagai Kepala Agama diganti dan dilanjutkan oleh haji Abu Suud Mansyur Al-Ghazali. Pada masa haji Abu Suud Mansyur inilah, Muhammadiyah di Temanggung mengalami perkembangan dalam pergerakannya. Berbagai kegiatan dakwah dikembangkan dengan menghidupkan kelompok pengajian untuk melakukan pemurnian tauhid pada masyarakat sekitar. Berdirinya Muhammadiyah di Temanggung, atas rintisan haji Ikhsan secara resmi tepatnya tanggal 26 Noveber 1926 M, kemudian dilanjutkan haji Suud Mansyur Al-Ghazali (*Ibid*).

Langkah awal pergerakan Muhammadiyah Temanggung adalah mendirikan Amal Usaha *Hollandsche Indlandsche School Qur'an (HIS)* Muhammadiyah pada tahun 1927 dan juga Hizbul Wathan. HIS Muhammadiyah yang didirikan, terletak di Jalan MT Haryono No. 23, yang sekarang menjadi SMP Muhammadiyah 1 Temanggung, bertujuan untuk menampung anak-anak pribumi yang tidak masuk sekolah pemerintah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya 1937, atas jasa kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi Izin

untuk mendirikan Sekolah *Schakel School*. Dipilihnya jalur pendidikan sebagai langkah awal untuk menyampaikan gagasan pembaharuan, dengan cara mengkombinasikan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan modern. Perkembangan berikutnya, sejak adanya Amal Usaha, selama kurun waktu 10 tahunan, tepatnya tahun 1945 berdirilah dua cabang baru yaitu Cabang Kowangan dan Cabang Kedu, (waktu itu belum bernama Cabang), dan menerbitkan sebuah majalah mingguan bernama “Al-Haq” (*Ibid*).

Sejarah mencatat, bahwa organisasi Muhammadiyah di Temanggung memiliki keterkaitan erat dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia khususnya wilayah Temanggung. Itu artinya, secara politik organisasi Muhammadiyah Memiliki andil besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Semua itu tidak terlepas dari perilaku politik elite Muhammadiyah di dalam mengelola sumber daya umat saat itu. Pergumulan pemikiran dan pergerakan melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat, Muhammadiyah ikut serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, dan politik.

### **4.3 Dinamika Pemilukada Kabupaten Temanggung**

Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Temanggung 2013 diikuti oleh lima pasangan. Lima pasangan tersebut bersaing dalam meraih posisi dan merebut hati masyarakat melalui visi kepemimpinan ke depan di dalam mewujudkan kabupaten Temanggung Jawa Tengah maju dan sejahtera. Tentu bukanlah hal mudah mempresentasikan diri serta menjelaskan kepada masyarakat Temanggung perihal apa yang akan dilakukan untuk mereka. Pasalnya, masing-masing visi pasangan memiliki kekuatan

dan penjelasan teknis yang cukup baik, sehingga diharapkan mampu mendulang suara berlipat bagi mereka pasangan calon. Berikut pasangan calon dan visinya dalam pencalonan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, 2013).

Tabel 4.13  
Pasangan dan Visi Calon

No	Nama Pasangan Calon	Asal Partai/ Koalisi	Visi Pasangan Calon
1	Budiarto dan Dedi Haryadi	PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, Hanura	<i>Bersatu Menuju Masyarakat Temanggung yang Lebih Sejahtera. Motto, Kerja Keras, Cerdas, Jujur, Ikhlas dan Anti Korupsi.</i>
2	Fuad Hidayat dan Andoyo	PKB, Gerindra	<i>Maju Lebih Cepat Sejahtera Bersama, Menuju Kabupaten Temanggung Berprestasi di Tingkat Nasional.</i>
3	Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi	PDI-P	<i>Temanggung kota agraris yang berwawasan lingkungan, desa dan kota sebagai tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan agamis diwujudkan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.</i>
4	Hadi Kuswanto	Perseorangan	<i>Mewujudkan Temanggung</i>

	dan Tri Murdoko	dan Independen	<i>sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang religious dan gemah ripah loh jinawi.</i>
5	Anif Punto Utomo dan Budidoyo	PAN	<i>Temanggung MANTAB (Mandiri, Aman, Nyaman, Tertib, Adil dan Bermartabat).</i>

Visi itu penting sebagai wawasan, target dan jangkauan idealitas ke depan, selain itu juga sebagai cara untuk berkomunikasi sosial-politik atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pandangan program lima tahun ke depan oleh para calon di dalam memajukan kabupaten Temanggung. Di situlah masyarakat bebas menentukan pilihannya. Kemerdekaan memilih membuat masyarakat menjadi kritis, karena ada ruang transparansi, negosiasi dan kompromi politik. Meski diakui, kemerdekaan memilih juga dibarengi “serangan” gencar para kontestan melalui tim sukses mereka guna meraup suara sebagaimana yang telah ditargetkan. Ada ruang lobi, tawar menawar dan kompromi politik sebagai sebuah komunikasi politik antara para calon bupati dan wakil bupati sebagai kontestan dan warga.

Khusus berkaitan dengan perolehan suara tertinggi di wilayah Kauman, khususnya di TPS 4 dan TPS 6, berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Temanggung.

Desa/ Kelurahan : Temanggung

Kecamatan : Temanggung



Kabupaten : Temanggung  
Provinsi : Jawa Tengah

Tabel 4.14  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di  
Wilayah Kauman Temanggung

A	Nomor dan Nama Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung	TPS 4	TPS 6
1	<b>K H. BUDIARTO, MT DAN DEDI HARYADI, SE</b>	(20,1 %)	(1,59 %)
2	<b>FUAD HIDAYAT DAN ANDOYO</b>	(12,56 %)	(3,97 %)
3	<b>Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO DAN IRAWAN PRASETYADI, S.Si</b>	(20,6 %)	(9,5 %)
4	<b>MUHAMAD HADI KUSWANTO DAN TRI MURDOKO SINGKONO. S.IP</b>	(2,01 %)	(0,8 %)
5	<b>ANIF PUNTO UTOMO DAN BUDIYONO</b>	(38,7 %)	(81,3 %)
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	187	245
B	Jumlah Suara Tidak Sah	(6,03 %)	(2,7 %)

C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	199	252
---	--------------------------------	-----	-----

Sumber: Data diolah dari data KPU Temanggung.

#### 4.4 Landasan Normatif Penyelenggaraan Pemilukada

Pengertian dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilukada

Pada hakikatnya, prinsip dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung adalah berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Statemen sekaligus sebagai landasan pelaksanaan konstitusionalnya ada pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945. Berikutnya, Undang-undang nomor 12 tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian Peraturan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terakhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada atau Pilkada), adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat (Cakra Arbas, 2012, 31). Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang,

“Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Demikian juga penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan secara materil dapat dikatakan bahwa Pemilu memang tidak berbeda dengan pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya (*Ibid*).

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara (Yusdianto, 2010).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan (*Ibid*).

Dasar normatifitas dalam pelaksanaan Pemilukada yang diatur dalam Undang-undang, menyatakan bahwa berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu (Ramlan Surbakti dalam Titik Triwulan Tutik, 2005, 10):

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompentensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan *syndrome* dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politic*).
3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan

figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat, dan

5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilukada merupakan kegiatan pemilu, hal ini berdasarkan (Petikan Putusan MK. No. 072-073/PUU-II/2004):

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari sudut asas yang digunakan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dilihat dari segi penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh

KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD, adalah penyelenggaraan Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah menikah mempunyai hak memilih, juga merupakan pemilih dari pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya oleh Anggaran DPRD.
4. Pembuat Undang-undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan Pasal 18 ayat (4), yang termasuk domain pemerintah daerah (Pasal 18) bukan hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi juga DPRD.
5. Pembuat Undang-Undang melakukan penafsiran untuk Pasal 18, tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/62315/Chapter%20II.pdf;jsessionid=537E5314A408AB855928E206AC81A5D2?sequence=3>.

#### 4.5 Dinamika Politik dan Koalisi Partai-partai Kontestan Pemilukada

Partai-partai yang memiliki jumlah kursi secara signifikan di DPRD, secara politik cenderung memiliki kekuatan di dalam kemenangan pada proses Pemilukada berlangsung. Bagi partai-partai yang tidak memiliki jumlah kursi cukup, maka koalisi merupakan jalan yang mesti ditempuh oleh partai bersangkutan. Pada Pemilukada Temanggung tahun 2013, hanya PAN dan PDI-P yang memiliki jumlah kursi signifikan, yakni tujuh kursi, sementara lainnya tidak mencukupi. Maka dari itu, PPP, PKNU, Demokrat, Golkar dan Hanura berkoalisi mengusung Budiarto; PKB dan Gerindra berkoalisi mengusung Fuad Hidayat; sementara Hadi Kuswanto dari calon independen.

Berdasarkan data lapangan, PAN dan PDI-P berhadapan oleh karena khusus kedua partai tersebut tidak berkoalisi dengan partai manapun, karena tercukupinya jumlah kursi. Berikut Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Temanggung tahun 2013.

Tabel 4.15  
Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah  
Kabupaten Temanggung tanggal 26 Mei 2013

No	Nama Calon	Partai Pengusung	Latar Belakang	Jumlah Perolehan Suara
1	Budiarto	PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, Hanura	Ka. Dinas Perhubungan (PNS)	61.528 suara (20.07 %)

2	Fuad Hidayat	PKB, Gerindra	Ketua DPC PKB Kab. Temanggung	79.018 suara (25.77 %)
3	Bambang Sukarno	PDI-P	Ketua DPRD Kab. Temanggung	125.549 suara (40,95 %)
4	Hadi Kuswanto	Perseorangan dan Independen	Pengusaha	7.907 suara (2.58%)
5	Anif Punto Utomo	PAN	Wartawan Senior Republika	33.363 suara (10.64%)

Sumber: Data KPU Kabupaten Temanggung.

Data lain yang penting untuk disertakan adalah data soal jumlah total pemilih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah direkapitulasi oleh KPU Temanggung. Dari data KPU Temanggung, ada 578.446 daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Jumlah total pemilih tersebut masing-masing laki-laki sebanyak 289.057 dan perempuan sebanyak 289.389 pemilih. Proses pemilihan dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.717 yang tersebar di 20 kecamatan.<sup>3</sup> Proses pemungutan suara berjalan dinamik.

Dari hasil urutan nomor calon, jika diurutkan sesuai jumlah perolehan suara sebagai berikut.

Tabel 4.16  
Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah  
Kabupaten Temanggung tanggal 26 Mei 2013,  
Sesuai dengan Urutan Jumlah Perolehan Suara Terbanyak

---

<sup>3</sup><https://daerah.sindonews.com/read/766769/28/pimpin-temanggung-bambang-irawan-resmi-dilantik-1375094522>.



No	Nama Calon	Partai Pengusung	Latar Belakang	Jumlah Perolehan Suara
1	Bambang Sukarno	PDI-P	Ketua DPRD Kab. Temanggung	125.549 suara (40,95 %)
2	Fuad Hidayat	PKB, Gerindra	Ketua DPC PKB Kab. Temanggung	79.018 suara (25,77 %)
3	Budiarto	PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, Hanura	Ka. Dinas Perhubungan (PNS)	61.528 suara (20,07 %)
4	Anif Punto Utomo	PAN	Wartawan Senior Republika	33.363 suara (10,64%)
5	Hadi Kuswanto	Perseorangan dan Independen	Pengusaha	7.907 suara (2,58%)

Sumber: Diolah dari Data KPU Kabupaten Temanggung.

Berikutnya, penting di kemukakan di sini tentang Modalitas yang dimiliki oleh para calon bupati Temanggung sebagai kaca perbandingan di dalam melihat masalah. Berikut gambarannya.

Tabel 4.17  
Modalitas Calon Bupati

No	Nama Calon	Politik	Ekonomi	Simbolik
1	Budiarto	a. Wakil Bupati Temanggung 2008-2013 b. Kepala Dinas	a. Dewan Pembina Organda kab. Temanggung	a. Ketua Bidang IPTEK ICMI

		<p>Perhubungan Pariwisata kab. Temanggung 2006-2008</p> <p>c. Kepala DPU kab. Temanggung 1992-2003</p> <p>d. Kepala Seksi Bina Program DPU kab. Temanggung 1988-1992</p>	<p>b. Dewan Pembina Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Temanggung</p>	<p>Temanggung</p> <p>b. Birokrat</p> <p>c. Pebisnis</p>
2	Fuad Hidayat	<p>a. Ketua PMII Fisip Undip Semarang 1997</p> <p>b. Ketua DPC PKB Temanggung 2005-2010</p> <p>c. Ketua Komisi A DPRD Jateng 2009-</p> <p>d. Sekjen DPW PKB Jateng 2006-2011</p> <p>e. Anggota DPRD Jateng 2008-2009</p>	-	Politisi PKB wilayah Jawa Tengah
3	Bambang Sukarno	<p>a. Ketua DPRD kab. Temanggung</p>	<p>Direktur CV. Gusindo Jaya</p>	<p>Politisi Partai Pengusaha</p>

		<p>2010-2014</p> <p>b. Ketua DPRD kab. Temanggung 2005-2009</p> <p>c. Ketua DPRD kab. Temanggung 1999-2004</p> <p>d. Ketua DPC Pro-Mega 1996</p> <p>e. Ketua DPC PDI-P Temanggung 2010-2015</p>		
4	Hadi Kuswanto	<p>a. Kasigar Proga Denma Mabelsal 2008-2009</p> <p>b. Pabandya Ren Lantamal X Jayapura 2004-2008</p> <p>c. Kaur Evalap Disbekal Mabelsal 2003-2004</p> <p>d. Kadeplog Kari TTM 508, 1997-2003</p> <p>e. Ajudan Dangkolin 1997-1997.</p>	-	Ketua PAMMI kab. Temanggung

5	Anif Punto Utomo	a. Wartawan Republika 1993-2013 b. Berita Buana 1991-1992	-	Wartawan Senior Republika
---	------------------	--	---	---------------------------

Sumber: Diolah dari Data KPU Kabupaten Temanggung dan informasi terkait.

Melihat dari pemaparan tersebut, kelima calon bupati secara ekonomi memiliki tingkat kemampuan rata-rata. Justru kekuatan ekonomi mereka di dalam Pemilu 2013, bertumpu pada calon wakil bupati. Masing-masing calon bupati memiliki calon wakil bupati yang kuat secara ekonomi dan pengaruh bisnisnya di wilayah kabupaten Temanggung. Begitu juga dengan calon bupati yang diusung Muhammadiyah, selain pedagang sukses juga membawahi asosiasi petani tembakau Temanggung yang nota bene penghasil terbesar tembakau kabupaten Temanggung. Secara ketokohan, masing-masing mempunyai modal sosial yang berimbang di masyarakat. Potensi sosial yang kuat dan jaringan yang luas rata-rata dimiliki oleh kelima calon bupati Temanggung 2013.

Selanjutnya, perlu dikemukakan juga di sini, perihal posisi masing-masing calon bupati agar dapat diketahui kekuatan pengaruhnya di masyarakat atau secara kelembagaan. Berikut tabel di bawah ini.

Tabel 4.18  
Posisi dan Pengaruh

No	Nama Calon Bupati	Posisi dan Pengaruh
1	Budiarto	a. Birokrat pemerintahan b. Berpengalaman di bidang kedinasan

		c. Memiliki kemampuan jaringan sosial yang baik di lingkungan masyarakat.
2	Fuad Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai kekuatan akar rumput pada warga Nahdliyin</li> <li>b. Berpengalaman dalam organisasi politik sejak mahasiswa (dari PMII)</li> <li>c. Memiliki jaringan sosial</li> </ul>
3	Bambang Sukarno	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Politisi tulen yang lahir dari partai politik</li> <li>b. Memiliki jaringan kuat dalam peta politik</li> <li>c. Meski tiga periode berturut-turut mencalonkan diri sebagai bupati Temanggung gagal (hingga akhirnya terpilih 2013), tetapi tak kenal menyerah</li> <li>d. Dikenal baik di lingkungan kalangan akar rumput masyarakat PDI-P Temanggung</li> </ul>
4	Hadi Kuswanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seorang prajurit TNI AL</li> <li>b. Memiliki prestasi yang baik di lingkungan TNI khususnya AL</li> <li>c. Memiliki hubungan sosial yang baik di masyarakat.</li> </ul>
5	Anif Punto Utomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wartawan senior Republika</li> <li>b. Masa remajanya selama di Temanggung dikenal masyarakat Kauman sebagai pribadi yang kuat dan humanis</li> <li>c. Keteguhan pada agamanya, dan mampu membangun komunikasi sosial yang</li> </ul>

		<p>baik dengan warga Muhammadiyah dan PAN</p> <p>d. Memiliki kemampuan membangun jaringan politik antara Muhammadiyah, PAN dan organ-organ lainnya.</p> <p>e. Dikenal baik di lingkungan Kauman, meski tidak tinggal menetap di Temanggung.</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa masing-masing calon bupati memiliki potensi dan peran sosial yang baik di masyarakat.